

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penulis:

Dina Siti Handayani¹

Ridwan²

Afiliasi:

Universitas Indonesia

Mebangun^{1,2}

Korespondensi:

dinasitihandayani@stu

dent.inaba.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 07-06-2024

Accepted: 29-06-2024

Published: 01-07-2024

Abstrak:

Tujuan penelitian adalah menganalisis dan mengevaluasi dampak Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode Kuantitatif yang meliputi pendekatan analisis deskriptif dan verifikatif telah diterapkan dalam penelitian ini. Data utama selama penelitian berasal dari Data Primer yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran angket kepada keseluruhan pegawai instansi pemerintahan. Populasi yang diteliti terdiri dari 55 individu, yang merupakan keseluruhan pegawai yang bekerja pada DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung. Teknik sampling jenuh telah digunakan dalam penelitian ini, sehingga sampel yang dipergunakan adalah keseluruhan populasi, yaitu 55 pegawai atau staf dari instansi pemerintah tersebut. Temuan koefisien determinasi, memaparkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan memiliki pengaruh sebesar 60,68% pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sementara sisanya 39,32% % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. dipengaruhi oleh beragam faktor yang belum diteliti. Interpretasi koefisien korelasi menempatkan nilai ini dalam kategori korelasi kecil, karena berada di rentang 20% hingga 40%.

Kata kunci: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan

Pendahuluan

Otonomi daerah adalah upaya untuk memberikan kekuasaan pada daerah untuk memutuskan dan mengelola sumber daya sesuai kepentingan, dan potensinya. Dengan otonomi tersebut, keputusan keuangan berada pada pemerintah daerah. Untuk melaksanakan otonomi dengan baik, diperlukan sistem akuntansi yang mendukung pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, (Moh. Khusaini, 2018). Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan aset Kota Bandung atas urusan Pemerintah Daerah, (Hida et al., 2024). Pengelolaan keuangan negara, didapati dua konsep fundamental penting untuk ekonomi, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Ulqista & Berliani, 2024).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok tahun 2016, 2017, dan 2018 menampilkan pencapaian kinerja pembangunan Kota Depok, secara makro maupun mikro, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah. LKIP menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan strategis yang diukur melalui indikator kinerja utama, serta melaksanakan program dan kegiatan untuk memperoleh pencapaian. Pada tahun 2018, pengukuran pada 21 target dengan 36 IKU menunjukkan bahwa 21 indikator 58,33% mencapai target, sementara 15 indikator (41,67%) tidak tercapai tujuan. Dari indikator yang tidak tercapai, 6 indikator (16,67%) menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, 8 indikator (22,22%) tidak tercapai tujuan, dan 1 indikator (2,78%) tidak memiliki data, (cms.depok., 2020).

Kinerja adalah output pada proses yang dinilai dan di ukur pada periode tertentu sesuai dengan peraturan, perjanjian yang telah ditetapkan, (Dewiyani et al., 2020). Kinerja organisasi merupakan totalitas kerja yang didapatkan sebuah organisasi. Dalam menolak ukur persentasi keberhasilan organisasi dengan adanya indikator yang jelas, (Sayidah & Maryuni, 2020).

Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan terkait akuntabilitas. Berdasarkan laporan dari Tribun Jabar, Kabupaten Bandung Barat mendapat nilai CC dari Kementerian Pemberdayagunaan Kemenpan RB dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan pada masa satu tahun anggaran belum optimal. Penilaian terhadap lima komponen menunjukkan hasil yang rendah, terutama dalam perencanaan kerja, pengukuran kerja, pelaporan kerja, evaluasi kerja, dan pencapaian kinerja. Kabupaten Bandung Barat hanya berhasil meraih nilai dengan rentang 50-65, di mana perencanaan kerja yang tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati menjadi masalah utama, (Kisdiantoro, 2017).

NO	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTERPRETASI
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	> 65-75	Baik dan perlu sedikit perbaikan
4	CC	> 50-65	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	CC	>30-50	Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Gambar 1. Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil DISDUKCAPIL Kab. Bandung, meka berikut adalah predikat dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah:

Tabel 1. Laporan kinerja instansi pemerintah DISDUKCAPIL Kab.Bandung Tahun 2021 - 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2021		KINERJA 2022	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,00%	87,80%	100,00%	85,37%
		Cakupan Penerbitan/ Kepemilikan KK	100,00%	98,00%	100,00%	96,50%
		Cakupan Penerbitan/ Kepemilikan KTP-el	100,00%	98,05%	100,00%	99,50%
		Cakupan Penerbitan/ Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	100,00%	95,00%	100,00%	95,00%
		Cakupan Penerbitan/ Kepemilikan Akta Kematian	100,00%	41,00%	100,00%	40,00%
2		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi DISDUKCAPIL	100,00%	75,56%	100,00%	73,47%

	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan DISDUKCAPIL	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	100,00%	97,00%	100,00%	91,20%
	JUMLAH		100,00%	84,63%	100,00%	83,01%

Berdasarkan tabel 2 penyebab tidak tercapainya target nilai indikator kinerja 100%, (DISDUKCAPIL) Kab. Bandung pada tahun 2021 - 2022, program yang direncanakan belum terealisasi secara keseluruhan, karena adanya kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik, kurangnya partisipan, serta waktu yang terbatas dalam menjalankan program, menyebabkan pelaksanaan menjadi kurang optimal. Faktor yang diduga memegang pengaruh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi; Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Sistem Pengendalian Internal.

DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung memiliki tuntutan untuk merencanakan anggaran dengan baik dan membuat laporan keuangan untuk output atas kegiatan yang dilaksanakan dalam satu periode. Pada laporan realisasi anggaran tahun 2021-2022, masih terdapat sisa pembiayaan anggaran atau SILPA.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik di DISDUKCAPIL Kab. Bandung Tahun 2021 – 2022.

NO	URAIAN	2022		%	2021		%
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
1	BELANJA PEGAWAI	10.004.593.477	8.404.106.115	84,00%	9.703.106.263,04	8.095.433.003,00	83,43%
2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.757.044.835	16.669.611.173	93,88%	17.935.011.584,00	15.970.390.410,00	89,05%
3	BELANJA MODAL	13.938.239.430	13.261.104.550	95,14%	8.498.209.100,00	7.764.102.600,00	91,36%
	JUMLAH	41.699.877.742	38.334.821.838	91,93%	36.136.326.947,04	31.829.926.013	88,08%

(DISDUKCAPIL) Kab. Bandung mengalami fluktuasi persentase anggaran pada tahun 2021 dan 2022. Kinerja anggaran belanja tergolong rendah dan belum mencapai target serapan 100%. Pada tahun 2021, persentase realisasi anggaran mencapai 91,93%, dengan kelebihan 8,07%, yang menunjukkan bahwa anggaran belanja tidak efisien. Pada tahun 2022, persentase realisasi anggaran menurun menjadi 88,08%, dengan kekurangan 11,92% yang tidak terealisasi, meskipun anggaran belanja sudah cukup efisien.

Faktor yang mungkin berkontribusi terhadap ketidakmampuan mencapai target anggaran ini adalah ketidakjelasan sasaran anggaran, yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia tidak terealisasi untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Anggaran harus ditetapkan dengan tujuan yang jelas agar mudah dipahami oleh pihak berwenang. Dana yang diberikan pemerintah pusat harus terserap 100%, tanpa kekurangan atau kelebihan dari yang dianggarkan. Ketidakjelasan dalam penetapan tujuan anggaran ini menghambat pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung, (Mahmudi, 2016).

Studi Literatur

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor public untuk menganalisis akuntansi, mengelola dana di lembaga negara dan departemen terkait, (Indra Bastian, 2015). Akuntansi sektor public guna informasi keuangan pemerintah untuk mengambil kebijakan oleh yang bertanggung jawab, (Abdul Halim, 2014).

Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

kinerja merupakan rencana tentang sejauh mana pelaksanaan, program, atau keputusan berhasil mencapai tujuan, fungsi, misi, dan visi yang dirumuskan dalam rencana strategis, (Indra Bastian, 2015).

Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja didefinisikan, kegiatan layanan yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk mencapai keinginan masyarakat dan melaksanakan hukum yang berlaku, (Mahmudi, 2016).

Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran untuk mengetahui proses penargetan anggaran yang dirumuskan dengan terperinci, hingga bisa dimengerti oleh pemegang tanggung jawab atas capaian target anggaran tersebut, (Nurkholis, 2019).

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern untuk struktur organisasi, teknik, dan ukuran yang diorganisir dengan tujuan melindungi aset, memastikan validasi data akuntan, mendorong efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, (Mulyadi, 2023).

Pengertian Sistem Pelaporan

Pelaporan keuangan untuk menunjukkan posisi keuangan dan keseluruhan transaksi yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan dalam jangka waktu tertentu, (Mahsun, 2020).

Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini, menganalisis dan mengevaluasi dampak Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian dilaksanakan dengan memanfaatkan Metode Kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang didapatkan melalui hasil observasi, wawancara, dan penyebaran angket kepada keseluruhan pegawai instansi pemerintahan. Teknik analisis yang dimangatkan saat penelitian adalah analisis verifikatif yang meliputi uji validitas dan reabilitas, asumsi klasik, dan uji hipotesis, (Wulan Dewi et al., 2022).

Populasi yang diteliti terdiri dari 55 individu, yang merupakan keseluruhan pegawai yang bekerja pada DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung. Teknik sampling jenuh telah digunakan saat penelitian berlangsung, sehingga sampel yang dipergunakan adalah keseluruhan populasi, yaitu 55 pegawai atau staf dari instansi pemerintah tersebut, (Hida et al., 2024).

Hasil

Tabel 3. Temuan Validitas

No	Variabel	Rentang Kolerasi	r tabel	Ket
1.	Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	0,589* - 0,910*	0,2656	Valid
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran,	0,498* - 0,783*		
3.	Sistem Pengendalian Internal	0,670* - 0,897*		
4.	Sistem Pelaporan	0,593* - 0,748*		

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan SPSS, 2024

Validitas menghasilkan korelasi untuk setiap variable melebihi batas stabil 0,2656, hingga setiap kuisioner dikategorikan valid.

Tabel 4, Temuan Reabilitas

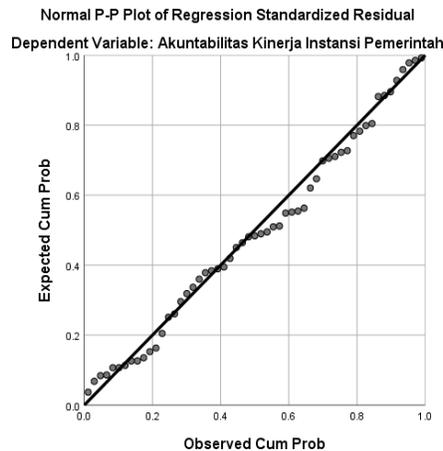
No	Variabel	Alpha Cronbach	Skor Kritis	Ket
1.	Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	0.852	0,60	Reliabel
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran,	0.723		
3.	Sistem Pengendalian Internal	0.865		
4.	Sistem Pelaporan	0.728		

Reabilitas yang diperoleh tiap kuisioner Alpha Cronbach > 0,60, ini dapat dikategorikan bahwa kuisioner reliabel.

Tabel 5, Temuan Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstand Predicted Value
N	55
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200c

Temuan uji menggambarkan probabilitas yaitu 0,200 > 0,05 yang dapat dipastikan jika model telah berdistribusi dengan normal, sehingga memenuhi standar untuk digunakan.



Gambar 3. Uji Normalitas

Hasil uji menggambarkan keseluruhan titik tidak mengikuti garis, ini mengindikasikan data tidak terdistribusi secara normal.

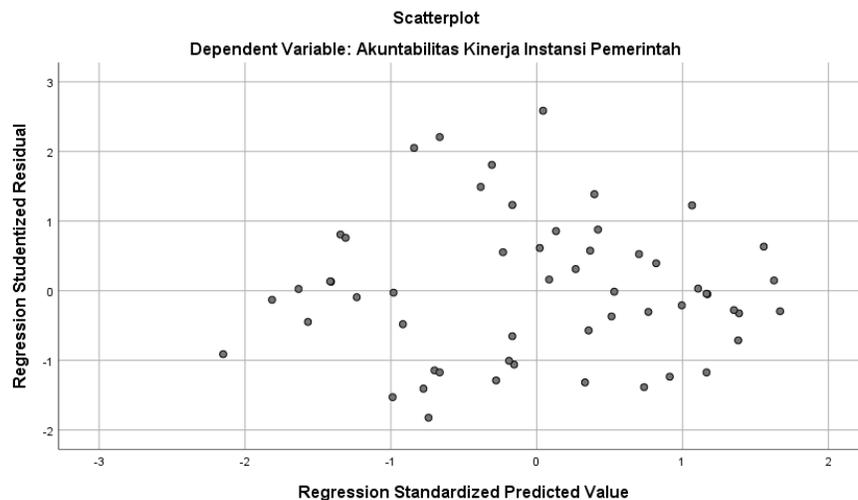
Tabel 6. Multikolinieritas

Variable	Tolerance	VIF
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.293	3.409
Sistem Pengendalian Internal	0.329	3.035

Sistem Pelaporan	0.761	1.315
------------------	-------	-------

Sumber: Uji SPSS (2024)

Hasil temuan menunjukkan bila hasil VIF keseluruhan variabel < 10 , dan hasil toleransi $> 0,10$. Sehingga bisa dipastikan jika model regresi tidak menunjukkan multikolinieritas.



Gambar 4. Uji Heteroskesdastis

Hasil menggambarkan keseluruhan titik tidak berpola, dan menemukan penyebaran titik yang membentuk pola tertentu. temuan mengindikasikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Tabel 7. Temuan Korelasi Pearson

Correlations		
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pearson Correlation	1
Kejelasan Sasaran Anggaran	Pearson Correlation	0.549**
Sistem Pengendalian Internal	Pearson Correlation	0.397*
Sistem Pelaporan	Pearson Correlation	0.746*

1. Temuan menyatakan bila pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) termasuk sedang, karena hasil koefisien korelasi 0,549.
2. Sistem Pengendalian Internal (X2) dan Keputusan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) termasuk rendah, karena hasil koefisien korelasi 0,397.
3. Sistem Pelaporan (X3) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) termasuk Besar, karena koefisien korelasi 0,746.

Tabel 8. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized		Standardized
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	3.953	2.374	
	Kejelasan Sasaran Anggaran	0.346	0.162	0.345
	Sistem Pengendalian Internal	-0.115	0.143	-0.123

Sistem Pelaporan	0.712	0.115	0.625
------------------	-------	-------	-------

Regresi linear membentuk persamaan regresi:

$$Y = 3.953 + 0.346 X_1 - 0.115 X_2 + 0,712 X_3$$

Tabel 9. Temuan Koefiensi Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	0.779	0.607	0.584	2.71636	0.607

$$Kd = (0,779)^2 \times 100\% = 60,68\%$$

Temuan R Square yaitu 0,607 mengindikasikan jika Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan memiliki pengaruh sebesar 60,68% pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sementara sisanya 39,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Tabel 10. Temuan Autokorelasi

Model Summary ^b	
Sig. F Change	Durbin-Watson
0	2.066

Hasil temuan mendapati nilai DW yaitu 2.066, sedangkan dengan taraf sig yaitu 0,05 dan sampel sebanyak 52, serta variable bebas yaitu 3, maka diperoleh DL yaitu 1.4339 dan DU yaitu 1.6769, sehingga dapat diputuskan bila $DU < DW < 4-DU$ yang memastikan jika tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.

Tabel 11. Temuan Parsial T

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.665	0.102
Kejelasan Sasaran Anggaran	2.130	0.038
Sistem Pengendalian Internal	-0.806	0.424
Sistem Pelaporan	6.205	0

Temuan Uji T, memperoleh taraf signifikan α (5%) , serta $df_1 = n-k-1$ dan $df_2 = 51$ (55-3-1), sehingga ditemukan hasil t tabel yaitu 1.29837

1. Hasil hasil sig dari Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yaitu $0,038 > 0,05$, kemudian t hitung $2,130 > t$ tabel (1.298), maka dapat diartikan bila H1 diterima. Sehingga menandakan adanya dampak positif yang kuat dari X1 terhadap Y.
2. Temuan sig dari Sistem Pengendalian Internal (X2) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah $0,424 > 0,05$, kemudian t hitung yaitu $-0,806 < t$ tabel (1.298), maka dapat diartikan bila H0 diterima. Sehingga menandakan tidak ada pengaruh dari X2 terhadap Y.
3. Temuan hasil sig dari Sistem Pelaporan (X3) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah $0 < 0,05$, kemudian t hitung yaitu $6,205 > t$ tabel yaitu 1.298, maka dapat diartikan bila H3 diterima. Sehingga menandakan adanya pengaruh yang kuat dari X3 terhadap Y.

Tabel 12. Temuan Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	581.035	3	193.678	26.249	0.000 ^b
	Residual	376.310	51	7.379		
	Total	957.345	54			

Sumber: Diolah SPSS (2024)

Didasarkan pada temuan diatas, maka dengan sig (5%), serta $df_1 = 3$ ($k-1$), $df_2 = 51$ ($55-k-1$), maka telah ditemukan F tabel yaitu 2,786. Sehingga dengan $sig < 0,05$, dan diperoleh F hitung $26,249 > F$ tabel (2,786). ini mengindikasikan H4 dapat diterima atau H0 ditolak, sehingga memastikan Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan memegang dampak silmutan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembahasan

Temuan Kejelasan Sasaran Anggaran

Analisis statistik memaparkan Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) $0,038 > 0,05$, beserta t hitung $2,130 > t$ tabel (1.298), mengindikasikan bahwa H1 diterima. Sehingga terbukti Kejelasan Sasaran Anggaran memegang dampak positif pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Temuan (Wardani & Silvia, 2021) telah menunjukkan hasil yang selaras.

Temuan Sistem Pengendalian Internal

Analisis statistic mendapati, bukti Sistem Pengendalian Internal (X2) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) $0,424 > 0,05$, beserta t hitung $-0,806 < t$ tabel (1.298), hingga disimpulkan bila H0 diterima. Sehingga Sistem Pengendalian Internal (X2) tidak memegang pengaruh apapun pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Temuan ini tidak selaras dengan temuan, (Putri & Endiana, 2020).

Temuan Sistem Pelaporan Akuntabilitas

Berdasarkan analisis statistik, ditemukan Sistem Pelaporan (X3) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah $0 < 0,05$, serta t hitung $6,205 > t$ tabel (1.298), mengindikasikan jika H3 diterima. Terindikasi pengaruh Positif, pada Sistem Pelaporan (X3) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Temuan ini tidak sejalan dengan temuan, (Auditya, 2021).

Temuan Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan Akuntabilitas pada Kinerja Instansi Pemerintah.

Didasarkan pada temuan diatas, maka dengan sig (5%), serta $df_1 = 3$ ($k-1$), $df_2 = 51$ ($55-k-1$), maka telah ditemukan F tabel yaitu 2,786. Sehingga dengan sig $0,000 < 0,05$, dan hasil F hitung $26,249 > F$ tabel (2,786). ini mengindikasikan H4 diterima dan H0 ditolak, sehingga memastikan Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan memegang pengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara simultan.

Kesimpulan

Temuan uji validitas dan reliabilitas memaparkan hasil bahwa keseluruhan instrumen penelitian layak dan handal. Model regresi memastikan tidak ada masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas, meskipun terdapat autokorelasi positif. Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung pentingnya kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan hasil temuan uji hipotesis, telah berhasil menunjukkan jika kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memegang dampak signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan hasil t hitung masing-masing 2,130 dan 6,205 $> t$ tabel yaitu 1,298, serta nilai sig yang lebih rendah dari 0,05. Sistem pengendalian internal tidak memegang pengaruh dengan t hitung $-0,806 < t$ tabel dan hasil sig 0,424

> 0,05. Uji F dengan nilai F hitung 26,249 > F tabel 2,786 dan sig 0,000 memastikan bila secara simultan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan memegang sebuah pengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan koefisien determinasi 60,68%, yang berarti variabel-variabel ini menjelaskan sebagian besar variasi dalam akuntabilitas kinerja.

Referensi

- Abdul Halim. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik : Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta :Salemba Empat,2014.
- Auditya, L. (2021). ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Fairness*.
- Bpk. (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
- Bpk. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
- bpk. (2014). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
- Bpk. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
- cms.depok. (2020). *LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016*. Cms.Depok.Go.Id.
- Dewiyani, A. A., Rahmi, P. P., & Herlina, L. (2020). PENGARUH EMPLOYEE ENGAGEMENT, BEBAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PADA CV ANUGRAH SUKSES MANDIRI The Influence Of Employee Engagement, Workload And Job Satisfaction On Performance On CV Anugrah Sukses Mandiri. *MAHATANI*, 3(2).
- Hida, R., Utami, S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022). *JURNAL MANEKSI*, 13(2).
- Indra Bastian. (2015). *Akuntansi sektor publik : suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Kisdiantoro. (2017). *KBB Dapat Nilai CC, Kinerja Pemerintah Dinilai Mengecewakan*. Jabar.Tribunnews.Com.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik / Mahmudi*. Yogyakarta : UII Press, 2016.
- Mahsun. (2017). *Metode penelitian bahasa : tahapan, strategi, metode, dan tekniknya* . Rajawali Pers.
- Mahsun. (2020). *PANDUAN PRAKTIKUM AUDIT KONTEMPORER*. Scopindo Media Pustaka.
- Moh. Khusaini. (2018). *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi, Edisi 4*. Penerbit Salemba.
- Nurkholis. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Universitas Brawijaya Press.

- Putri, P. A. Y., & Endiana, I. D. M. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA KOPERASI DI KECAMATAN PAYANGAN). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 179–189. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1433.179-189>
- Sayidah, N., & Maryuni, Y. (2020). *PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018*. <https://jurnal.inaba.ac.id/>
- Ulqista, S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*.
- Wardani, N. desiana, & Silvia, D. (2021). PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*.
- Wulan Dewi, K., Herlinawati, E., Suryaningprang, A., & Sudaryo, Y. (2022). Pengaruh CR, DER, TATO, dan ROA Terhadap PBV Pada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 3(2). <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe>